

Dari Mimesis Menuju Rekonsiliasi: Filsafat René Girard dan Etika Publik Tanpa Korban di Indonesia

Onesimus Febriano Ngewar Wagur¹, Elioardus Lusin Fukuruas²

¹ Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia (email: febryanowagur99@gmail.com)

² Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia (email: fukuruaselio@gmail.com)

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 17 October 2025

Revised: 20 October 2025

Accepted: 13 November 2025

Available online: 29 November 2025

Kata Kunci:

René Girard; ; mimesis; kekerasan sosial; rekonsiliasi; etika publik.

Keywords:

René Girard; mimesis; social violence; reconciliation; public ethics.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan meneliti relevansi filsafat René Girard dalam memahami kekerasan sosial dan membangun etika publik tanpa korban di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan hermeneutik-filosofis dengan analisis konseptual terhadap karya-karya utama René Girard dan fenomena sosial di Indonesia. Melalui pembacaan atas teori mimetik, penelitian ini menunjukkan bahwa akar kekerasan terletak pada keinginan manusia yang bersifat meniru (mimesis), yang melahirkan rivalitas dan krisis sosial. Ketika ketegangan sosial mencapai puncaknya, masyarakat cenderung menyalurkan agresinya melalui mekanisme kambing hitam, yakni dengan

mengorbankan individu atau kelompok tertentu demi memulihkan ketertiban semu. Dengan menganalisis sejumlah peristiwa sosial-politik di Indonesia seperti kasus Ahok (2016), polarisasi Pemilu 2024, dan demonstrasi 2025, studi ini mengungkap bahwa kekerasan modern bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga simbolik dan digital. Dalam perspektif filsafat sosial Girardian, transformasi masyarakat menuju rekonsiliasi menuntut perubahan orientasi mimetik, dari peniruan yang destruktif menuju peniruan yang solider. Studi ini menemukan bahwa mekanisme kambing hitam masih beroperasi dalam bentuk kekerasan simbolik dan digital, dan bahwa rekonsiliasi sosial menuntut kesadaran mimetik baru yang berorientasi pada belas kasih dan pengakuan terhadap korban.

ABSTRACT

This study explores the relevance of René Girard's philosophy in understanding social violence and developing a victimless public ethics in Indonesia. It employs a hermeneutic-philosophical approach through conceptual analysis of Girard's major works and contemporary Indonesian socio-political phenomena. Drawing on mimetic theory, this research argues that the root of violence lies in human desire as imitation (mimesis), which generates rivalry and social crisis. When social tensions escalate, societies tend to channel their aggression through the scapegoat mechanism, sacrificing an individual or group to restore a semblance of order. By analyzing key Indonesian socio-political events such as the Ahok case (2016), the 2024 election polarization, and the 2025 demonstrations, the study reveals that modern violence operates not only physically but symbolically and digitally. From a Girardian social-philosophical perspective, true reconciliation requires a transformation of mimetic orientation, from destructive imitation to compassionate imitation. The study finds that the scapegoat mechanism continues to operate through symbolic and digital violence, and that social reconciliation demands a new mimetic awareness oriented toward compassion and recognition of victim.

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan sosial yang terus berulang dalam sejarah manusia menyingkap kenyataan bahwa kekerasan bukan sekadar penyimpangan moral, melainkan struktur yang melekat dalam kehidupan sosial. Indonesia, dengan kondisi masyarakatnya yang plural, juga tidak luput dari dinamika tersebut. Dalam dua dekade terakhir, berbagai peristiwa sosial-politik seperti konflik bernuansa agama, ujaran kebencian di media digital, serta kekerasan dalam demonstrasi publik menunjukkan bahwa masyarakat masih mudah jatuh ke dalam pola mencari “pihak lain” sebagai sumber masalah. Dalam konteks ini, teori René Girard tentang mimesis dan mekanisme kambing hitam menawarkan kerangka analitis yang tajam untuk memahami akar antropologis dari kekerasan sosial di Indonesia.

Girard menegaskan bahwa keinginan manusia bersifat meniru (*mimetic desire*). Manusia tidak mengetahui secara jelas hal-hal yang diinginkannya sehingga meniru keinginan orang lain (Girard, 1961: 83). Proses ini melahirkan persaingan dan krisis sosial, sebab ketika dua subjek menginginkan hal yang sama, mereka saling menghalangi satu sama lain. Rivalitas ini dapat berkembang menjadi kekerasan kolektif. Ketika masyarakat berada di ambang kehancuran, mereka menemukan cara untuk memulihkan ketertiban dengan mengorbankan satu individu atau kelompok tertentu yang dijadikan korban sebagai kambing hitam (Girard, 1972: 86).

Dalam konteks Indonesia, mekanisme tersebut tampak dalam berbagai peristiwa di mana kelompok mayoritas menyalurkan ketegangan sosial kepada pihak minoritas. Pengorbanan sosial sering terjadi bukan karena kesalahan nyata korban, melainkan karena kebutuhan masyarakat untuk memulihkan stabilitas. Sebagaimana ditegaskan Frans Magnis-Suseno (2016: 54), kekerasan simbolik sering kali lebih mematikan daripada kekerasan fisik, sebab ia menghancurkan martabat tanpa darah. Pernyataan ini mempertegas relevansi teori Girard dalam membaca kekerasan modern yang bersifat halus tetapi tetap destruktif. Lebih jauh, peristiwa-peristiwa politik dan sosial seperti kasus penistaan agama tahun 2016, polarisasi Pemilu 2024, serta demonstrasi besar pada Agustus-September 2025 memperlihatkan bahwa kekerasan kini bekerja melalui ruang simbolik dan digital. Dalam ruang tersebut, narasi dan citra menjadi alat untuk menyingkirkan “yang lain.” Mekanisme kambing hitam yang dahulu bekerja dalam ritus keagamaan kini hadir dalam bentuk baru, yakni melalui opini publik, media sosial, dan politik identitas.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis relevansi teori Girard bagi pemahaman kekerasan sosial di Indonesia. Secara khusus, studi ini hendak menjawab pertanyaan bagaimana filsafat Girard dapat menjadi etika publik tanpa korban dalam konteks kekerasan sosial di Indonesia.

Struktur tulisan dimulai dari bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan relevansi kajian, tinjauan teoretis mengenai teori mimetik dan mekanisme kambing hitam Girard, analisis terhadap tiga kasus sosial di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan refleksi filosofis atas makna etis dan politis dari pengakuan terhadap korban. Tulisan ini diakhiri dengan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi filosofis bagi pembentukan budaya damai di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model penelitian kepustakaan yang berorientasi pada analisis filsafat sosial. Desain penelitian ini bersifat analitis-interpretatif dengan cara membaca, mengurai, dan menafsirkan teks-teks, terutama karya René Girard dan data kontekstual tentang peristiwa sosial di Indonesia untuk membangun argumentasi filosofis dan rekomendasi etis.

ANTROPOLOGI KEKERASAN DAN MIMESIS DALAM PERSPEKTIF RENÉ GIRARD

René Girard menempatkan mimesis sebagai inti dari antropologi keinginan manusia. Dalam bukunya yang berjudul *Deceit, Desire, and the Novel*, ia menegaskan bahwa manusia tidak tahu apa yang harus diinginkannya, tetapi meniru keinginan orang lain agar keinginannya memiliki arah (Girard, 1961: 83). Keinginan manusia, menurut Girard, tidak bersifat otonom, tetapi selalu dimediasi oleh orang lain yang dijadikan model. Hubungan ini disebut mediasi keinginan, di mana subjek meniru keinginan model dan pada akhirnya bersaing untuk memiliki objek yang sama. Ketika dua subjek saling meniru, lahirlah apa yang disebut rivalitas mimetik, sebuah bentuk persaingan yang bukan sekadar ekonomi atau politik, melainkan eksistensial.

Menurut Girard, setiap keinginan merupakan keinginan untuk menjadi seperti orang lain. Ketika dua subjek menginginkan hal yang sama, mereka terlibat dalam kompetisi yang tidak lagi mengenai objek, tetapi mengenai pengakuan (Girard, 1961: 95). Rivalitas ini merupakan akar dari konflik sosial. Ketika keinginan tidak lagi diarahkan pada objek tetapi pada status dan pengakuan, masyarakat masuk ke dalam situasi krisis yang disebut Girard sebagai krisis mimetik.

Dalam bukunya yang berjudul *Things Hidden Since the Foundation of the World*, ia menulis bahwa peniruan keinginan membawa manusia ke dalam situasi di mana batas antara yang sah dan yang dilarang menjadi kabur (Girard, 1987: 24). Di sini tampak jelas bahwa krisis mimetik dapat meluas menjadi kekacauan sosial karena keinginan kolektif saling meniru dan memperkuat. Pada titik ini, masyarakat memerlukan cara untuk memulihkan ketertiban, dan di sinilah mekanisme kambing hitam berfungsi.

Dalam bukunya yang berjudul *Violence and the Sacred*, Girard menjelaskan bahwa masyarakat purba menemukan mekanisme pengorbanan sebagai cara untuk menyalurkan kekerasan yang tidak terkendali (Girard, 1972: 86). Ia menegaskan bahwa komunitas memilih korbannya bukan karena ia bersalah, melainkan karena kematiannya dapat mengembalikan perdamaian (Girard, 1972: 86). Korban ini sering kali merupakan individu yang dianggap berbeda, asing, atau memiliki status ambivalen di dalam masyarakat. Proses ini bersifat kolektif dan simbolik. Dengan mengorbankan satu pihak, masyarakat merasa telah menyingkirkan akar kekacauan dan memulihkan keteraturan sosial. Wolfgang Palaver menafsirkan mekanisme ini sebagai cara masyarakat mengatasi rasa takut terhadap kekerasan dengan menyalurkannya pada satu individu. Ia menulis bahwa masyarakat mentransfer kekacauan internalnya kepada individu tertentu, dan dengan demikian, pengorbanan menjadi terapi sosial yang menipu (Palaver, 2013: 57). Tampak jelas bahwa mekanisme ini tidak pernah disadari sebagai kekerasan karena selalu dibungkus

dalam bahasa religius atau moral. Pengorbanan dipahami sebagai “ritus penyucian”, bukan kejahatan. Girard menyebut fenomena ini sebagai *sacralization of violence* (pensakralan kekerasan) (Girard, 1972). Dengan cara demikian, kekerasan mendapatkan legitimasi sosial. Girard menegaskan bahwa setiap masyarakat bergantung pada korban dan pengorbanan merupakan cara komunitas meneguhkan dirinya sendiri (Girard, 1972: 93).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk dan sarat simbol-simbol moral-religius, mekanisme mimetik mudah terpicu ketika terjadi perebutan makna atas kebenaran, kesalehan, atau nasionalisme. Ketegangan identitas, seperti yang terlihat pada kasus Ahok tahun 2016 atau polarisasi Pemilu 2024, menunjukkan bagaimana keinginan kolektif untuk mempertahankan “kesucian” dan “identitas moral” ditiru secara massal hingga melahirkan krisis sosial. Kekerasan dalam bentuk ujaran kebencian, persekusi daring, dan penghakiman publik menjadi manifestasi *rivalitas mimetik* yang bertransformasi ke ranah digital. Dalam istilah Girard, masyarakat modern telah “menyingkirkan altar, tetapi tidak menyingkirkan hasrat untuk mengorbankan.” Dengan demikian, ruang digital berfungsi sebagai “altar baru” bagi pengorbanan simbolik.

Teori mimetik Girard tidak hanya menjelaskan dinamika keinginan manusia, tetapi juga membuka kritik moral terhadap kebudayaan kekerasan di Indonesia. Teorinya mampu memberikan pemahaman bahwa akar kekerasan bukan terletak pada ideologi atau perbedaan agama, melainkan pada keinginan meniru yang salah arah, yakni peniruan terhadap kemarahan, bukan kasih; terhadap dominasi, bukan solidaritas. Maka, pemahaman terhadap antropologi kekerasan Girardian dalam konteks Indonesia menuntut perubahan arah *mimesis* dari destruktif menuju reflektif, yakni meniru teladan kasih dan keadilan yang mampu memutus rantai kekerasan kolektif.

Dalam karyanya *The Scapegoat*, Girard menunjukkan bahwa tradisi Alkitab membongkar mitos pengorbanan yang menjadi dasar masyarakat kuno. Ia menegaskan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, korban diakui tidak bersalah dan dengan pengakuan tersebut seluruh sistem mitos runtuh (Girard, 1986: 104). Kisah penderitaan Kristus menjadi simbol pembalikan total terhadap mekanisme kambing hitam. Korban yang sebelumnya dianggap penyebab kekacauan kini diungkap sebagai pihak yang tidak bersalah. Pengungkapan ini memiliki konsekuensi teologis dan antropologis besar karena kekerasan kehilangan status sakralnya. Girard menulis lebih lanjut bahwa kebenaran Injil bukanlah kekerasan yang dikuduskan, melainkan pengampunan yang mengakhiri lingkaran balas dendam (Girard, 1986: 112). Wahyu ini menandai titik balik dalam kesadaran manusia. Sejak saat itu, masyarakat mulai memahami bahwa perdamaian sejati tidak bisa dibangun di atas penderitaan korban.

James Alison, seorang teolog yang mengembangkan teori Girard, menulis bahwa setiap orang hanya bisa meninggalkan kekerasan dengan belajar meniru “yang lain” yakni Kristus, yang menolak balas dendam dan membuka jalan solidaritas (Alison, 1996: 79). Dengan demikian, jalan keluar dari siklus kekerasan bukanlah meniadakan *mimesis*, melainkan mengarahkannya kepada teladan kasih.

KEKERASAN SIMBOLIK DAN MIMESIS MODERN: DARI RITUAL KE RUANG DIGITAL

Pada bagian ini, teori mimetik Girard diterapkan untuk membaca konteks sosial modern di Indonesia, khususnya fenomena kekerasan simbolik di ruang digital. Girard menegaskan bahwa meskipun dunia modern mengaku rasional, ia tidak pernah lepas dari logika pengambilan. Ia menegaskan bahwa setiap individu telah menyingkirkan altar, tetapi tidak menyingkirkan hasrat untuk mengorbankan (Girard, 1987: 215). Hal ini menjadi bukti bahwa kekerasan kini muncul dalam bentuk simbolik seperti ujaran kebencian, stigmatisasi sosial, dan *cancel culture* (budaya pembatalan). Dalam konteks Indonesia, fenomena ini terlihat dalam maraknya *scapegoating* digital di media sosial, di mana individu atau kelompok tertentu diserang secara massal dan simbolik.

Franz Magnis-Suseno menegaskan bahwa kekerasan simbolik sering kali lebih berbahaya karena bekerja dalam legitimasi moral (Magnis-Suseno, 2016: 61). Selain itu, A. Setyo Wibowo (2020: 38) menambahkan bahwa *scapegoating* di era digital dilakukan dalam bentuk penghinaan virtual yang dibungkus dengan moralitas. Dengan demikian, teori Girard membantu membaca bagaimana kekerasan modern bertransformasi dari fisik ke simbolik. Ia mampu mengungkap bahwa mekanisme pengorbanan tidak pernah hilang, tetapi hanya berpindah bentuk. Girard berpendapat bahwa kekerasan bukanlah anomali, melainkan fondasi tersembunyi dari kebudayaan manusia. McNeil (2023: 48) memperluas konsep ini dengan menjelaskan bahwa dalam masyarakat sekuler, fungsi ritus itu berpindah ke institusi sosial, media, dan politik. Dengan demikian, media sosial dapat dipahami sebagai "altar digital" tempat masyarakat menyalurkan agresi kolektifnya. Fenomena *digital scapegoating* atau pengambilan digital menjadi salah satu manifestasi paling nyata dari transformasi kekerasan dalam masyarakat modern. Hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus seperti persekusi daring terhadap figur publik atau kelompok minoritas, yang merupakan bentuk baru dari pengorbanan sosial. Dalam konteks negara Indonesia, bentuk baru dari pengorbanan sosial tersebut terbukti dalam praktik polarisasi politik dan ujaran kebencian di ruang virtual yang membuktikan bahwa kekerasan simbolik tersebut beroperasi tanpa kesadaran akan mekanisme mimetik yang mendasarinya.

Lebih lanjut, mimesis reflektif dapat menjadi dasar bagi pendidikan etis dan media literasi, agar masyarakat Indonesia tidak mudah terseret dalam spiral kebencian yang dibentuk oleh algoritma dan opini publik. Secara metodologis, penelitian-penelitian kontemporer ini juga menunjukkan pergeseran dari pendekatan hermeneutik menuju pendekatan interdisipliner yang menggabungkan filsafat, sosiologi, dan studi media. *Contagion* menampilkan berbagai studi yang menghubungkan teori mimetik dengan psikologi sosial dan teori komunikasi. Hal ini membuka peluang bagi penelitian di Indonesia untuk memadukan teori Girard dengan analisis media digital dan dinamika politik identitas. Kekerasan yang muncul di ruang publik kini bukan sekadar persoalan moral individu, melainkan juga hasil dari struktur mimetik yang diperkuat oleh teknologi komunikasi dan algoritma sosial. Dengan demikian, teori Girard tetap aktual karena mampu menyingkap logika pengorbanan di balik fenomena sosial yang tampak modern dan rasional.

Bagi filsafat di Indonesia, integrasi pemikiran Girard dengan studi kontemporer memberi dua kontribusi penting. Pertama, ia menegaskan bahwa kekerasan sosial

tidak dapat dihapus tanpa mengubah pola keinginan yang meniru dan saling bersaing. Kedua, ia menawarkan paradigma baru bagi politik rekonsiliasi yang bukan hanya mengampuni pelaku, melainkan juga menyadari struktur keinginan kolektif yang melahirkan korban baru. Sebagaimana ditegaskan Girard (1986: 209), bahwa kekerasan yang tidak dikenali akan selalu mencari korban baru. Oleh karena itu, kesadaran mimetik menjadi langkah awal menuju transformasi sosial yang sejati.

Teori Girard dalam perspektif kontemporer sangat relevan untuk memahami konteks Indonesia karena ia berusaha menyingkap struktur kekerasan sosial yang tersembunyi di balik narasi moralitas publik. Dalam masyarakat multikultural seperti di Indonesia, ketegangan antaridentitas mudah berkembang menjadi rivalitas mimetik. Ketika solidaritas sosial melemah, masyarakat cenderung mencari kambing hitam untuk memulihkan keseimbangan. Franz Magnis-Suseno (2001: 46), menegaskan bahwa bangsa yang tidak mengakui kekerasannya sendiri akan terus mencari musuh baru untuk menutupi ketakutannya. Pernyataan ini selaras dengan Girard yang mengatakan bahwa setiap masyarakat selalu membutuhkan korban untuk menegaskan kesatuan semunya (Girard, 1972: 132). Dengan demikian, teori mimetik Girard bukan hanya alat analisis, melainkan juga kritik moral terhadap cara masyarakat menanggapi konflik. Ia menantang setiap orang untuk menolak logika pengorbanan dan membangun solidaritas yang berakar pada pengakuan terhadap korban.

MANIFESTASI MEKANISME KAMBING HITAM DALAM KONTEKS SOSIAL DI INDONESIA

Mekanisme kambing hitam tampak nyata dalam tiga kasus utama, yakni kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (2016), polarisasi Pemilu 2024, dan demonstrasi besar tahun 2025. Ketiga kasus ini memperlihatkan wajah masyarakat yang menyalurkan ketegangan sosial melalui korban simbolik. Setiap kasus menunjukkan struktur krisis mimetik, di mana kekerasan dilegitimasi oleh moralitas kolektif dan media digital berperan sebagai ruang sakralisasi baru.

Peristiwa politik yang melibatkan Ahok memperlihatkan bagaimana mekanisme kambing hitam bekerja dalam masyarakat religius modern. Ucapan Ahok tentang Surat *Al-Maidah* 51 di Kepulauan Seribu memicu kemarahan luas dan menimbulkan gelombang demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai Aksi 212. Dalam situasi ini, figur publik yang semula dihormati berubah menjadi simbol ancaman bagi tatanan religius dan moral. Ketika ucapan Ahok tentang *AL-Maidah* 51 dikutip secara parsial dan dipolitisasi, masyarakat mengalami apa yang disebut Girard sebagai *crisis mimetic*. Masyarakat kehilangan pembeda antara yang sakral dan profan akibat persaingan atas iman dan moralitas publik. Dalam krisis tersebut, Ahok menjadi korban simbolik yang menanggung beban ketegangan antaragama dan antaridentitas politik.

René Girard menjelaskan bahwa dalam setiap masyarakat yang terancam oleh krisis mimetik, selalu akan muncul kebutuhan untuk menyingkirkan seseorang yang dianggap sebagai sumber kekacauan (Girard, 1972: 104). Hal ini membuktikan bahwa kemarahan kolektif dalam kasus Ahok dapat dipahami sebagai manifestasi dari krisis mimetik, di mana keinginan akan “kesucian publik” dan “keteraturan moral”

direproduksi secara massal melalui peniruan kemarahan satu sama lain. Figur korban dipilih bukan karena kesalahannya, melainkan karena kehadirannya mampu menyalurkan ketegangan sosial yang melanda masyarakat.

Lebih lanjut, Magnis-Suseno menegaskan bahwa kemarahan yang dibungkus kesalehan sering kali justru menjadi alat kekerasan moral terhadap pihak yang dianggap menodai iman (Magnis-Suseno, 2016: 22). Di sini, tampak jelas bahwa Ahok menjadi simbol kambing hitam yang “dikorbankan” demi memulihkan identitas moral bangsa. Ketika ia dijatuhi hukuman penjara, banyak yang menilai bahwa keadilan telah ditegakkan, padahal yang sebenarnya terjadi adalah peneguhan terhadap logika pengorbanan. Girard memperingatkan bahwa Perdamaian yang dibangun atas penderitaan korban adalah perdamaian yang rapuh, sebab ia bergantung pada pengulangan kekerasan (Girard, 1986: 141). Dengan demikian, kasus Ahok mengungkap bagaimana agama dan politik dapat bersatu dalam produksi kekerasan simbolik yang tampak saleh, tetapi sesungguhnya memperdalam luka sosial.

Kekerasan terhadap Ahok, baik dalam bentuk demonstrasi besar 2 Desember 2016 maupun dalam tekanan sosial terhadap pendukungnya, dilegalkan melalui klaim “pembelaan terhadap agama”. Dalam kerangka Girardian, tindakan itu menunjukkan bagaimana kekerasan disakralkan melalui kekerasan terhadap korban yang dianggap suci karena dihubungkan dengan pemulihan tatanan moral (Girard, 1987: 173). Namun, wahyu kebenaran korban muncul ketika masyarakat mulai menyadari bahwa kasus tersebut lebih mencerminkan perebutan kekuasaan ketimbang pembelaan iman. Ketika narasi korban mulai dibuka melalui dokumenter, refleksi teologis lintas iman, dan solidaritas sipil, terjadi pergeseran dari logika pengorbanan menuju kesadaran bahwa ketertiban sejati tidak bisa dibangun di atas penyingkiran. Kesadaran inilah yang membuka peluang bagi rekonsiliasi sosial dan pembacaan ulang iman yang lebih inklusif.

Pemilu 2024 menjadi salah satu momen paling memecah belah dalam sejarah demokrasi Indonesia. Persaingan politik antara kandidat utama tidak hanya terjadi di ruang politik formal, tetapi juga di media sosial, tempat jutaan pengguna terlibat dalam produksi dan reproduksi kebencian. Fenomena digital *scapegoating* muncul jelas di sini. Label seperti “cebong”, “kampret”, “kadrun”, dan “buzzer” menciptakan dikotomi moral yang kaku antara “kami” dan “mereka”. Rivalitas ini tidak lagi mengenai gagasan politik, tetapi tentang identitas dan pengakuan diri. Girard menggambarkan situasi ini sebagai rivalitas mimetik kolektif yang menjadikan kekerasan modern bukan lagi membutuhkan senjata, melainkan kata-kata dan citra. Ia mereproduksi mekanisme pengorbanan melalui opini publik (Girard, 1987: 214). Dalam konteks ini, korban simbolik bukanlah individu tunggal, melainkan kelompok sosial yang dicap sebagai “pengkhianat bangsa” atau “radikal”. Kekerasan simbolik mewujud dalam ujaran kebencian daring, disinformasi, dan pembentukan narasi “kami versus mereka”. Seperti dijelaskan Girard, masyarakat yang kehilangan kesadaran reflektif terhadap keinginan mimetiknya akan mencari musuh bersama untuk memulihkan rasa persatuan (Girard, 2001: 19–22).

Wolfgang Palaver menambahkan bahwa dalam masyarakat modern, kambing hitam tidak lagi dibunuh, tetapi dihancurkan reputasinya (Palaver, 2013: 61). Fenomena persekusi digital terhadap tokoh-tokoh tertentu, baik politisi, jurnalis, maupun aktivis, menunjukkan bahwa media sosial menjadi altar baru bagi

pengorbanan simbolik. A. Setyo Wibowo (2020: 38) menyebut fenomena ini sebagai ritual baru kekerasan simbolik yang dilakukan tanpa darah, tetapi tidak “tanpa luka”. Masyarakat yang terjebak dalam logika ini mudah percaya bahwa “penghancuran moral” seseorang adalah bentuk penegakan keadilan. Padahal, sebagaimana ditulis Girard bahwa korban selalu dibutuhkan untuk menegaskan kesatuan semu dari komunitas yang takut pada perpecahan (Girard, 1972: 132). Dengan demikian, polarisasi Pemilu 2024 mencerminkan rivalitas mimetik nasional, di mana kekerasan berpindah dari jalanan ke ruang digital, tetapi struktur pengorbanannya tetap sama.

Lebih lanjut, Legitimasi kekerasan muncul melalui narasi patriotik dan religius pada kebencian yang dipersepsikan sebagai bentuk cinta tanah air atau pembelaan terhadap iman. *Sacralization of violence* ini memperlihatkan bahwa masyarakat masih mempercayai mitos lama: tatanan sosial dapat dipulihkan melalui pengorbanan pihak lain. Namun, *wahyu kebenaran korban* muncul dalam refleksi pasca-Pemilu, ketika masyarakat menyadari kerusakan sosial akibat polarisasi digital dan mulai membangun inisiatif literasi politik damai. Kesadaran bahwa lawan politik bukan musuh, melainkan sesama warga negara, merupakan langkah awal menuju *demystifikasi violence* (Haryatmoko, 2022: 215–218).

Gelombang demonstrasi besar yang terjadi di Indonesia antara Agustus dan September 2025 menandai titik krisis baru dalam hubungan antara negara dan warga. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat 228 aksi protes di seluruh Indonesia pada periode 25 Agustus–7 September 2025, dengan 11 orang meninggal dunia dan lebih dari 3.000 orang ditahan (Kemendagri, 2025: 2). Peristiwa yang paling mengguncang publik adalah kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang terlindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta. Rekaman video insiden itu viral dan memicu gelombang solidaritas serta kemarahan publik terhadap aparat keamanan. Komnas HAM, dalam laporan investigasinya, menyebutkan bahwa sebagian besar korban demonstrasi adalah masyarakat sipil yang tidak melakukan kekerasan (Komnas HAM, 2025: 4). Dalam kasus ini, rasa frustasi sosial menular cepat melalui media digital, di mana emosi kemarahan dan keadilan direproduksi tanpa refleksi. Dalam konteks ini, *crisis mimetic* terjadi ketika tuntutan yang awalnya rasional berubah menjadi luapan emosi kolektif yang tampak pada setiap kelompok yang meniru ekspresi kemarahan kelompok lain. Ketika situasi semakin tegang, aparat keamanan dan pemerintah menjadi sasaran kebencian kolektif, sementara di sisi lain para demonstran dituduh “anti-nasional”. Kedua belah pihak saling menjadikan pihak lain sebagai *korban simbolik*. Kekerasan kemudian dilegitimasi atas nama “menegakkan hukum” atau “memperjuangkan keadilan sosial”. Inilah bentuk *sacralization of violence* dalam masyarakat modern di mana setiap kubu merasa memiliki moralitas sakral yang membenarkan tindakannya (Girard, 1972: 278–282).

Menurut Girard, ketika tatanan sosial runtuh, masyarakat mencari satu tubuh yang dapat menanggung kesalahannya (Girard, 1986: 119). Dalam kasus ini, tubuh korban seperti Affan menjadi medium penyaluran kemarahan publik terhadap negara dan aparat. Masyarakat menuntut keadilan, tetapi pada saat yang sama, korban juga menjadi simbol penderitaan kolektif yang disucikan. Inilah paradoks mekanisme kambing hitam, “ korban sekaligus disalahkan dan dimuliakan”.

Menurut Magnis-Suseno, dalam masyarakat yang kehilangan arah moral, korban sering kali dijadikan tempat penebusan kolektif yang berperan sebagai simbol

kesalahan yang harus dihapus agar kita dapat merasa benar kembali (Magnis-Suseno, 1999: 61). Selain korban individu, fenomena lain yang menonjol adalah keterlibatan ribuan pelajar dan mahasiswa. Komisi Perlindungan Anak Indonesia melaporkan bahwa lebih dari dua ribu anak ikut dalam aksi demonstrasi, dan hampir tiga ratus di antaranya ditetapkan sebagai tersangka (KPAI, 2025: 2). Fenomena ini memperlihatkan bagaimana mimesis politik bekerja dalam skala generasi.

Wolfgang Palaver menegaskan bahwa setiap kali masyarakat meniru kemarahan, kekerasan menjadi ritual yang tampak sah (Palaver, 2013: 79). Hal ini mengafirmasi bahwa demonstrasi yang terjadi pada tahun 2025 memperlihatkan bagaimana kekerasan yang dilegitimasi oleh negara dan masyarakat saling meniru, menciptakan siklus baru korban dan pelaku. Girard kembali menegaskan bahwa tidak ada korban yang benar-benar tunggal. Setiap korban menciptakan rantai korban baru (Girard, 1987: 276). Dengan demikian, tragedi di tahun 2025 tidak hanya menunjukkan kegagalan aparat, tetapi juga menyingkap mekanisme sosial yang lebih dalam, yakni masyarakat yang terus mencari pengorbanan baru untuk menutupi ketakutan dan kehilangan arah moralnya.

Dalam kerangka Girardian, *wahyu kebenaran korban* dapat muncul ketika penderitaan para korban kekerasan, baik aparat maupun warga sipil, mulai diakui secara terbuka. Narasi kemanusiaan yang menonjolkan luka dan kerentanan, bukan kemenangan moral, mampu membongkar logika pengorbanan itu. Seperti ditegaskan Girard, hanya dengan melihat korban tidak sebagai penyebab krisis, tetapi sebagai cermin kemanusiaan bersama, masyarakat dapat keluar dari lingkaran kekerasan (Girard, 2001: 104-107). Refleksi semacam ini penting untuk menumbuhkan etika publik tanpa korban yang menjadi fondasi rekonsiliasi sosial Indonesia.

Ketiga kasus di atas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terus mereproduksi pola *mimesis* dalam bentuk rivalitas politik, keagamaan, dan ekonomi. Di balik setiap krisis sosial, terdapat keinginan kolektif untuk memulihkan ketertiban melalui penciptaan korban baru. Namun, seperti ditekankan Girard, transformasi hanya mungkin terjadi ketika masyarakat berani menyingkap mitos kekerasan itu sendiri yang tampak jelas pada saat wahyu korban menggantikan logika pengorbanan. Dengan demikian, teori Girard tidak hanya menjadi alat analisis kekerasan, tetapi juga menawarkan horizon etika publik yang berakar pada pengakuan atas martabat korban dan panggilan menuju rekonsiliasi.

MENUJU ETIKA PUBLIK TANPA KORBAN: REFLEKSI FILOSOFIS ATAS POLITIK REKONSILIASI

Refleksi tentang korban, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menegaskan bahwa di balik setiap ketertiban sosial tersimpan mekanisme kekerasan yang disamarkan. Girard (1972: 31) memberi penekanan pada kekerasan yang merupakan fondasi tersembunyi dari kebudayaan manusia. Di sini tampak jelas bahwa setiap masyarakat membangun dirinya melalui pengorbanan yang dianggap suci. Namun, wahyu kebenaran korban sebagaimana yang diungkapkan dalam *The Scapegoat* mengguncang dasar ini. Ketika korban diakui tidak bersalah, kekerasan kehilangan sakralitasnya, dan kebudayaan dipanggil untuk menata ulang dirinya di atas dasar solidaritas (Girard, 1986: 104-106).

Dengan demikian, pembacaan atas Girard membawa kita dari pembongkaran mitos kekerasan menuju horizon etika publik tanpa korban, yakni sebuah kesadaran sosial yang menolak menjadikan penderitaan sebagai fondasi tatanan. Penerimaan terhadap korban mengandung daya transformatif, sebab ia menyingkap kerapuhan sekaligus potensi kemanusiaan yang sejati. Magnis-Suseno (2001: 46) mengingatkan bahwa bangsa yang tidak mengakui kekerasannya sendiri akan terus mencari musuh baru. Sementara, Palaver (2013: 61) menegaskan bahwa modernitas belum benar-benar meninggalkan ritus pengorbanan. Ia hanya menggantinya dengan bentuk simbolik yang lebih halus. Dalam konteks ini, etika publik menjadi panggilan untuk membongkar legitimasi kekerasan yang tersembunyi di balik moralitas kolektif.

Girard (1987: 315) tidak menolak mimesis, tetapi menegaskan bahwa keselamatan maupun kehancuran manusia bersumber dari kemampuan yang sama, yakni meniru. Di sinilah letak krisis sekaligus peluang etis. Manusia dapat memilih untuk meniru Kristus, teladan yang menolak balas dendam dan membuka jalan bagi pengampunan. James Alison (1996: 79) menyebut proses ini sebagai *conversion of desire*, pertobatan keinginan yang mengubah arah peniruan dari kekerasan menuju kasih. Dalam horizon ini, mimesis menjadi jalan penyembuhan sosial, sebab ia mengundang manusia untuk meniru solidaritas, bukan dominasi.

Etika publik tanpa korban menuntut keberanian untuk menatap wajah korban tanpa rasa benar. Dalam wajah itu, masyarakat dipanggil untuk mengenali dirinya sendiri bahwa setiap orang dapat menjadi pelaku sekaligus korban dari struktur yang sama. Pengakuan ini, sebagaimana dikatakan Girard (2001: 104-107), bukanlah sentimentalitas moral, melainkan langkah ontologis yang membangun kembali kemanusiaan di atas pengakuan terhadap yang rapuh. Filsafat, dalam bentuknya yang paling sejati, adalah gerak penyembuhan bukan sekadar memahami kekerasan, tetapi membebaskan diri darinya.

Bagi bangsa Indonesia, kesadaran ini sangat relevan. Dalam masyarakat yang masih mudah mencari kambing hitam demi menegaskan kesatuan semu, etika publik tanpa korban menjadi horizon kebudayaan baru. Magnis-Suseno (2010: 77) menegaskan bahwa demokrasi sejati hanya tumbuh bila kita berani melihat "yang lain" bukan sebagai ancaman, melainkan sesama yang sama-sama rapuh. Maka, politik rekonsiliasi yang sejati bukan lagi strategi kekuasaan, melainkan spiritualitas sosial yang berpusat pada keberanian untuk menolak logika pengorbanan dan memilih jalan belas kasih.

Akhirnya, filsafat publik Girardian mengingatkan bahwa setiap tindakan manusia adalah tindakan mimetik: kita selalu meniru sesuatu atau seseorang. Dunia modern yang dipenuhi polarisasi dan media digital menuntut model kemanusiaan baru yakni manusia yang meniru kasih, bukan kebencian, yang mengakui korban, bukan menyingkirkannya. Di sinilah etika publik tanpa korban menemukan makna terdalamnya sebagai panggilan untuk membangun masyarakat belas kasih, di mana perdamaian tidak lagi ditegakkan di atas penderitaan, melainkan pada pengakuan akan martabat setiap manusia.

PENUTUP

Studi ini menyimpulkan bahwa teori mimetik René Girard tetap relevan untuk memahami kekerasan sosial di Indonesia. Mekanisme kambing hitam masih bekerja dalam bentuk kekerasan simbolik dan digital, dan transformasi menuju masyarakat damai menuntut kesadaran mimetik baru yang berorientasi pada kasih dan solidaritas. Pemikiran Girard membuka jalan bagi pembentukan etika publik tanpa korban yang berakar pada belas kasih dan pengakuan terhadap kemanusiaan bersama.

Lebih lanjut, René Girard membuka kesadaran baru bahwa seluruh sejarah kemanusiaan adalah pergulatan antara peniruan dan kekerasan. Manusia tidak dapat hidup tanpa meniru, tetapi mimesis yang tidak disadari selalu berisiko melahirkan permusuhan. Dalam konteks inilah filsafat Girard memanggil kita untuk menatap wajah korban, bukan sekadar sebagai figur moral, melainkan sebagai cermin keberadaan manusia sendiri. Setiap korban menyibak struktur terdalam dari kebudayaan bahwa di balik keteraturan sosial terdapat kekerasan yang disamarkan. Menyadari kenyataan ini berarti memasuki ruang refleksi eksistensial, di mana filsafat tidak lagi berhenti pada penjelasan rasional, tetapi menjadi tindakan etis untuk menolak partisipasi dalam mekanisme pengorbanan.

Bagi bangsa Indonesia yang plural dan religius, pemikiran Girard memiliki daya gugah yang luar biasa. Ia menyingkap bahwa banyak kekerasan publik kita masih bekerja dalam pola kuno yang sama, yakni mencari kambing hitam demi menegaskan kesatuan semu. Dari ujaran kebencian di media sosial hingga diskriminasi terhadap kelompok tertentu, masyarakat kerap menegakkan moralitas dengan mengorbankan yang lemah. Dalam terang teori mimetik, kekerasan tersebut bukan sekadar akibat perbedaan ideologis, melainkan lahir dari keinginan meniru yang salah arah. Kita meniru kemarahan, bukan kasih; meniru kepentingan, bukan solidaritas. Oleh karena itu, jalan menuju transformasi sosial menuntut perubahan orientasi mimesis, dari imitasi destruktif menuju imitasi kreatif yang berakar pada empati dan pengakuan terhadap sesama.

Dalam horizon ini, tugas filsafat tidak hanya menjelaskan realitas kekerasan, tetapi juga menuntun masyarakat untuk melewatkannya. Filsafat publik yang berakar pada kesadaran Girardian harus berani membongkar logika kekerasan yang tersembunyi dalam wacana politik, ekonomi, dan agama. Ia harus menjadi ruang diskursif tempat bangsa belajar menafsirkan konflik bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang pembentukan kesadaran baru. Kesadaran tersebut hanya dapat tumbuh jika masyarakat bersedia mendengar suara korban, sebab dalam diri korban tersembunyi kebenaran tentang batas moral kita sebagai manusia.

Dalam jangka panjang, kesadaran mimetik dapat menjadi paradigma etika publik Indonesia. Pendidikan, media, dan kebijakan publik perlu diarahkan untuk menumbuhkan *mimesis reflektif*, yaitu kesadaran kritis terhadap dorongan imitasi yang membentuk opini dan tindakan kita. Dengan demikian, setiap warga belajar untuk meniru bukan kebencian kolektif, melainkan solidaritas dan belas kasih. Di sinilah politik rekonsiliasi menemukan makna filosofisnya: rekonsiliasi bukan sekadar perjanjian damai, melainkan pembebasan dari logika pengorbanan yang telah membentuk sejarah kekerasan manusia.

Akhirnya, filsafat Girard mengingatkan kita bahwa setiap tindakan manusia membawa resonansi spiritual: meniru berarti memilih siapa yang ingin kita jadikan model. Dunia modern yang dipenuhi kompetisi, polarisasi, dan media digital membutuhkan model kemanusiaan baru, yakni manusia yang meniru kasih, bukan kebencian, yang mengakui korban, bukan menyingkirkannya. Dengan menempuh jalan ini, bangsa Indonesia dapat bertransformasi dari masyarakat pengorbanan menuju masyarakat belas kasih, di mana perdamaian tidak lagi dibangun di atas penderitaan, tetapi pada kesadaran akan kemanusiaan yang saling terhubung. Dalam kesadaran inilah, filsafat menjadi praksis penyembuhan melalui sebuah upaya terus-menerus untuk menolak kekerasan dan menegakkan solidaritas sebagai wajah sejati dari kebudayaan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alison, J. (1996). *Raising Abel: The Recovery of the Eschatological Imagination*. New York: Crossroad Publishing.
- Dupuy, J. P. (2008). *The Mark of the Sacred*. Stanford: Stanford University Press.
- Fleming, C. (2004). *René Girard: Violence and Mimesis*. Cambridge: Polity Press.
- Girard, R. (1961). *Deceit, Desire, and the Novel: Self and Other in Literary Structure*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Girard, R. (1972). *Violence and the Sacred*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Girard, R. (1986). *The Scapegoat*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Girard, R. (1987). *Things Hidden Since the Foundation of the World*. Stanford: Stanford University Press.
- Girard, R. (2001). *I See Satan Fall Like Lightning*. Maryknoll: Orbis Books.
- Girard, R. (2007). *Achever Clausewitz*. Paris: Carnets Nord.
- Harahap, Devi. (2025, 2 September). "Komnas HAM: 11 Orang Meninggal dan 1.683 Ditahan dalam Demonstrasi Akhir Agustus." Retrieved from <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/807487/komnas-ham-11-orang-meninggal-dan-1683-ditahan-pada-demonstrasi-25-31-agustus-2025>
- Haryatmoko. (2004). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (2025). *Data Nasional Aksi Demonstrasi 25 Agustus-7 September 2025*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Politik Dalam Negeri.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2025). *Laporan Investigasi Awal Peristiwa Demonstrasi 25-31 Agustus 2025*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2025). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Tengah Aksi Massa*. Jakarta: KPAI.
- Magnis-Suseno, F. (2001). *Etika Sosial: Dasar dan Prinsip-Prinsip Moral Hidup Bersama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, F. (2010). *Demokrasi Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Magnis-Suseno, F. (2016). *Agama dan Krisis Moral Publik di Indonesia*. Jakarta: Obor.
- Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- McNeil, J. D. (2023). The Mimetic Sacred. *Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and Culture*, 30(1), pp. 44–48.
- Muliati, Anggi. (2025, 29 Agustus). “Rantis Brimob Lindas Ojol: Koalisi Sipil Desak Tindak Tegas Pelaku.” Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-8085267/rantis-brimob-lindas-ojol-koalisi-sipil-desak-tindak-tegas-pelaku>
- Palaver, W. (2013). *René Girard's Mimetic Theory*. Michigan: Michigan State University Press.
- Schwager, R. (2000). *Must There Be Scapegoats? Violence and Redemption in the Bible*. New York: Crossroad Publishing.
- Tjahyono, E. (2019). Mimesis dan Kekerasan dalam Perspektif Filsafat Girard. *Jurnal Filsafat Driyarkara*, 41(1), pp. 55–68.
- Wibowo, A. S. (2020). *Kekerasan Simbolik di Era Digital*. Yogyakarta: Kanisius.
- Williams, J. G. (1996). *The Girard Reader*. New York: Crossroad Publishing.